

PERANAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENANGANAN BENCANA BANJIR DI KOTA SUNGAI PENUH (STUDI KASUS KECAMATAN HAMPARAN RAWANG)

Nanda Putra, S.A.P¹, Murlinus, S.H., M.H², Hengki Fernanda, S.T., M.Si³
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :

nandaputra170698@gmail.com

murlinus@gmail.com

hengkifernanda@gmail.com

ABSTRACT

Title. The Role of Stakeholders in Handling Flood Disasters in Sungai Penuh City. This research was conducted at the Sungai Penuh City Regional Disaster Management Agency (BPBD) Office. The handling of flood disasters has not been carried out to the maximum because it is suspected that there is still the handling of flood disasters that are lacking in the community affected by the flood disaster and the role of stakeholders in managing floods is not yet optimal. The research problem formulation is, what is the role of stakeholders in the framework of flood management in Sungai Penuh City? The research objective is to find out the role of stakeholders in the context of flood management in Sungai Penuh City. This research uses a qualitative approach where data is obtained through field interview guidelines to 5 informants who refer to the research indicators, namely 1. Prevention 2. Warning 3. Preparedness 4. Disaster Impact 5. Response. 6. Recovery 7. Development. The data obtained in the field were analyzed based on the classification of the informant's answers described in the results and discussion of the research which was then interpreted by the researcher. it is known that the Role of Stakeholders in Handling Flood Disasters in Sungai Penuh City there are 5 indicators of the framework of thinking that have not been maximally implemented, namely the indicators of Prevention, Warning, Preparedness, Disaster Impacts and Discipline while for the Response and Development indicators have been implemented to the maximum. For this reason, the authors suggest that the role of stakeholders in handling flood disasters in Sungai Penuh City can be improved so that facilities and infrastructure as well as houses that are damaged due to flood disasters can be overcome properly.

Keywords: Role of Stakeholders, Flood Disaster Management

ABSTRAK

Judul. Peranan Stakeholders Dalam Penanganan Bencana Banjir di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh. Penanganan bencana banjir belum dilaksanakan dengan maksimal karena diduga masih adanya Penanganan bencana banjir yang kurang terhadap masyarakat kena musibah bencana banjir dan belum maksimalnya peranan stakeholders dalam menangani bencana banjir. Rumusan masalah penelitian yaitu, bagaimanakah peranan Stakeholder dalam rangka penanganan bencana banjir di Kota Sungai Penuh? Tujuan penelitian yaitu, Untuk mengetahui peranan Stakeholder dalam rangka penanganan bencana banjir di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui pedoman wawancara lapangan kepada 5 orang informan yang mengacu kepada indikator penelitian yaitu 1. Pencegahan 2. Peringatan 3. Kesiapsiagaan 4. Dampak Bencana 5. Tanggapan. 6. Pemulihan 7. Pembangunan. Data yang diperoleh dilapangan dianalisis berdasarkan pengklasifikasian jawaban informan yang diuraikan dalam hasil dan pembahasan penelitian yang kemudian dilakukan interpretatif peneliti. diketahui bahwa Peranan Stakeholders Dalam Penanganan Bencana Banjir di Kota Sungai Penuh ada 5 indikator dari kerangka pemikiran yang belum terlaksana secara maksimal yaitu indikator Pencegahan, Peringatan, Kesiapsiagaan, Dampak Bencana, dan Pemuliahn sedangkan untuk indikator Tanggapan dan Pembangunan sudah terlaksana dengan maksimal. Untuk itu penulis menyarankan agar Peranan Stakeholders dalam penanganan bencana banjir di Kota Sungai Penuh dapat ditingkatkan agar sarana dan prasarana serta rumah yang rusak karena bencana banjir dapat teratasi dengan baik.

Kata Kunci : Peranan Stakeholders, Penanganan Bencana Banjir

I. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir Indonesia sering dilanda bencana. Posisi Indonesia yang berada di antara tiga lempeng besar dunia telah mengakibatkan Indonesia menjadi sangat rentan terhadap bencana. Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang menimbulkan bencana. Faktor lainnya adalah akibat kerusakan ekologi, yang akar permasalahannya adalah manusia.

Bencana telah mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi korban dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kerugian tidak hanya dialami oleh masyarakat, akan tetapi juga dirasakan oleh pemerintah. Untuk mengatasi dan mengurangi kerugian tersebut, diadakanlah kegiatan penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan penanggulangan bencana ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tapi juga lembaga-lembaga lain yang ikut membantu dan tanggap dalam bencana seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan, masyarakat pun juga ikut dalam usaha penanggulangan bencana.

Usaha penanggulangan bencana harus dimulai sedini mungkin, yaitu sebelum terjadinya bencana di daerah yang tergolong rawan bencana. Pada awalnya penanggulangan bencana dipusatkan pada usaha yang dilakukan setelah terjadinya bencana, seperti tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Akan tetapi, perspektif ini telah bergeser menjadi penanggulangan bencana yang dimulai sejak sebelum terjadinya bencana, yaitu peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan upaya untuk mengurangi resiko bencana (mitigasi). Bencana tidak pernah diketahui kapan akan melanda suatu daerah, untuk itu dibutuhkan kesiapan orang-orang yang akan menghadapi bencana, terutama di daerah rawan bencana.

Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana. Usaha pengurangan resiko bencana ini melibatkan berbagai pihak yang sangat terkait dengan bencana. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah, LSM, masyarakat dan lembaga lainnya yang ikut membantu dalam penanggulangan bencana. Begitu pula pada usaha yang dilakukan saat terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam masalah ini.

Upaya peningkatan kesiapan dan tindakan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial masyarakat. Karakteristik sosial masyarakat yang mempengaruhi adalah kelembagaan sosial, derajat kohesivitas, stratifikasi sosial masyarakat, dan pengetahuan lokal masyarakat. Semua karakteristik sosial budaya ini mungkin dimiliki oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai modal bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana dan mengurangi resiko bencana dan dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh masyarakat pada saat terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana, sehingga dapat dilihat tingkat kesiapan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah rawan bencana dalam menghadapi kemungkinan bencana yang akan terjadi. Akan tetapi, karakteristik sosial yang dimiliki oleh masyarakat ini juga dapat menjadi kendala dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Bencana alam merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, iklim yang tidak menentu seringkali berdampak pada terjadinya bencana alam yang datang dengan

tiba-tiba. Di Indonesia pada umumnya merupakan wilayah rawan bencana alam, hampir disetiap tahun di setiap daerah mengalami berbagai bencana alam.

Bencana alam memberikan dampak yang sangat besar pada masyarakat, bahaya yang ditimbulkan sangat tidak dapat diperkirakan, bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Menurut Nurjanah, (2013:57). Bencana alam di Indonesia khususnya bencana banjir merupakan bencana dengan jumlah kejadian yang sangat besar serta menyebar di hampir seluruh wilayah. Banjir adalah limpahan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpah dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai

Banjir disebabkan oleh curahan hujan yang berlebih sehingga menyebabkan sungai meluap ke daratan. Tidak adanya daerah resapan yang disebabkan oleh hutan gundul, penyempitan serta pendangkalan sungai mempengaruhi arus air sungai dari hulu ke hilir sehingga menyebabkan bencana banjir. Bukan hanya itu, sistem irigasi yang tidak baik serta penyumbatan oleh sampah pada aliran sungai dan irigasi membuat aliran air menjadi terhambat, hal ini merupakan fenomena ulah dari manusia yang tidak menjaga lingkungan sekitar dengan baik.

Penanganan bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana. Penanganan bencana merupakan proses dinamis tentang bagaimana bekerjanya fungsi-fungsi penanganan yang kita kenal selama ini misalnya fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

Penanganan bencana banjir khususnya pada mitigasi diterapkan, guna untuk mencegah dampak dari bencana banjir. Mitigasi perlu untuk dilakukan untuk mengurangi resiko dari bencana banjir serta bisa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta organisasi dalam penanganan bencana banjir. Menurut UU No 24 Tahun 2007 Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kasus bencana banjir di Indonesia dampaknya sudah sangat parah, setahun terakhir ini kasus bencana banjir terjadi dimana-mana, data BNPB menyebutkan bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2011-2016, 31,3 % adalah bencana banjir.

Mitigasi sangat berperan dalam pengurangan resiko bencana banjir, dengan mitigasi dampak bencana banjir dapat diminimalisir dengan baik. pengetahuan dan kemampuan masyarakat maupun stakeholder dapat meningkat dalam penanganan bencana banjir, sehingga korban jiwa, kehilangan harta benda serta dampak dari bencana banjir lainnya dapat ditangani. Mitigasi yang komprehensif perlu adanya peran stakeholder dalam penanganannya, karena tanpa peran stakeholder maka penyelenggaraan mitigasi dalam bencana banjir tidak akan berjalan.

Dalam Pembagian Tanggung Jawab Penanganan Bencana pada UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB (Badan Nasional, Penanggulangan Bencana Nasional) lembaga usaha, dan lembaga internasional adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mitigasi bencana banjir. Oleh sebab itu mitigasi perlu dilakukan dengan peran dan fungsi masing-masing. Sedangkan di daerah penanganan bencana banjir di atasi oleh BPBD (Badan penanggulangan bencana Banjir Daerah)

Begitu juga halnya di Kota Sungai Penuh sering terjadi bencana banjir, paling tidak terjadi 2 kali dalam setahun. Banjir terjadi di daerah dipemukinan yang rendah seperti kecamatan

hamparan rawang, kecamatan pesisir bukit dan kecamatan Sungai Penuh yang menyebabkan masyarakat mengalami kerusakan bangunan dan kerugian materil

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Wilayah kota Sungai Penuh merupakan salah satu daerah yang dialiri oleh sungai Batang Hari dan memiliki curah hujan rata-rata 129 mm/ bulan, topografi Kota Sungai Penuh di dominasi oleh perbukitan, sehingga mayoritas lahan (lebih dari 70%) memiliki kemiringan lebih dari 40%. Dengan kondisi topografi seperti ini membuat Kota Sungai Penuh rawan terhadap bencana tanah longsor dan banjir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh terdapat 24 kejadian banjir pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 28 kejadian pada tahun 2016.

Kerugian yang ditimbulkan berupa rumah dan sawah yang terendam, ternak yang mati, rusaknya jembatan, robohnya saluran irigasi, robohnya pasangan beronjong, jebolnya tanggul penahan tebing, robohnya tembok penahan tebing, terganggunya aktifitas warga, dan kerugian harta benda. Selain itu bencana banjir menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat seperti diare, psikis, ISPA, dan penyakit kulit yang paling banyak yaitu 270 kasus. Besarnya potensi kejadian dan dampak yang ditimbulkan akibat banjir di Sungai Penuh mendorong kebutuhan akan tindakan kesiapsiagaan di masyarakat untuk mengurangi kerugian akibat dampak.

Agar bencana banjir dapat diatasi dan ditanggulangi perlu adanya kerjasama dan penanganan yang baik dengan segala lapisan yang terkait yaitu stakeholder dari suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu supaya bencana yang datang tanpa diduga-duga dapat diprediksi dan dilakukan manajemen yang baik dalam penanggulangannya.

Dari fenomena yang ditemui oleh peneliti, kurang berperannya stakeholder dalam penanganan bencana banjir yaitu.

1. Kurangnya kerjasama masyarakat dalam mengatasi bencana banjir, seperti kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah dan suka membuang sampah di kali.
2. Kurangnya penanganan dalam mengatasi bencana banjir di Kota Sungai Penuh, seperti perbaikan drainase yang kurang maksimal
3. Kurang tanggapnya pemerintah dalam penanganan mengatasi bencana banjir, seperti penanganan yang lambat bagi masyarakat yang terdampak banjir

II.METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian Yang Digunakan

Pendekatan penelitian ini sebagai mana yang ingin di capai penulis untuk mengimplentasikan pelyanaan publik terhadap masyarakat di kota sungai penuh maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan agar secara runtun untuk memaparkan secara objektif dan rasional mengenai objek penelitian.

Infomasi Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam hal ini adalah masyarakat yang berjumlah 6 orang

Data Yang Akan Di Ambil

1. Data Primer
Data Primer Dapat Berupa Opini Subjek Secara Individual Atau Kelompok, Hasil Observasi Terhadap Suatu Benda, Kejadian Atau Kegiata, Dan Hasil Pengujian.
2. Data Sekunder

Berupa Data-Data Yang Telah Ada Seperti Arsip-Arsip, Dokumen, Dokumen, Artikel, Serta Laporan Yang Berhubungan Dengan Objek Penelitian.

Teknik Pengumpulan Data Yang Di Gunakan

Dalam Melakukan Penelitian, Data Yang Dikumpulkan Akan Di Gunakan Untuk Memecahkan Masalah Yang Ada Sehingga Data-Data Tersebut Harus Benar-Benar Dapat Dipercaya Dan Akurat.

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi
- d. Triangulasi

Alat pengumpulan data

Adapun alat yang di gunakan dalam penelitian ini:

1. Daftar pertanyaan / daftar wawancara
2. laptop
3. pena, buku tulis/kertas
4. alat perekam

Unit Analisis

Dalam penelitian ini adalah peran Stakeholder dalam penanganan bencana banjir di Kota Sungai Penuh yaitu kepala BPBD, petugas BPBD dan Masyarakat di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh .

Analisi Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dilapangan dan diolah dengan menggunakan interpretatif peneliti untuk mengolah data mentah yang relevan yang diperoleh dilapangan kemudian hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan angka-angka atau data statistik.

Menurut Miles dalam Emzir (2010 : 129)

Analisa data ada tiga cara yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih,memfokuskan,menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau parafrase.

b. Model data (data display)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data merupakan model data. Model (display) dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda dari pengukuran bensin, surat kabar , sampai layar computer. Melihat sebuah tanyangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu-analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.

Bentuk yang paling sering dimodel data kualitatif selama ini adalah teks naratif. Manusia tidak terlalu kuat sebagai pemproses dari sejumlah besar informasi, tendensi kognitif

merupakan mereduksi informasi yang kompleks kedalam berbagai gestalt yang dipilih atau konfigurasi-konfigurasi yang mudah dipahami. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan.

Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan kedalam sel yang mana merupakan aktivitas analisis.

c. Penarikan kesimpulan / Verifikasi

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan akhir tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seorang menyatakan telah memproses secara induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian Jawaban informan dan Interpretasi Data Prevention (pencegahan)

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah peranan Stakeholder dalam membuat kebijakan pencegahan bencana banjir? Jawaban dari informan yaitu:

“Pada prinsipnya sebagai pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan pencegahan bencana banjir harus memahami situasi dan kondisi daerah Kota Sungai Penuh yang merupakan daerah yang memiliki curah hujan yang cukup banyak, untuk itu perlu adanya kebijakan pencegahan agar bencana banjir dapat ditanggulangi, kenyataannya tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk membenahi gorong dipinggir jalan ataupun perbaikan drainase secara serius, karena perbaikan drainase tidak menambah besar gorong-gorong tetapi hanya mengganti material lama dengan material yang baru bahkan ada yang sudah rusak dalam waktu singkat setelah drainase itu diperbaiki.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Idoli pukul 10.45 Wib hari Senin tanggal 6 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan belum adanya tindakan serius oleh pemerintah dalam pencegahan bencana banjir, seperti perbaikan gorong-gorong dan drainase belum mampu menahan banjir.

“Kebijakan pemerintah dalam pencegahan bencana banjir masih kurang kelihatan hasilnya, hal ini dapat dilihat adanya pembiaran atau tidak ada tindakan terhadap bangunan masyarakat yang menutup drainase dan batas atap rumah yang melampaui trotoar sehingga air hujan ditampung oleh jalan raya dan air menumpuk sedangkan gorong mampet karena penyempitan gorong-gorong jalan yang digunakan oleh masyarakat, sehingga sering terjadi banjir kalau hujan lebat terutama di daerah Koto Keras sampai Sungai Liuk perbatasan Sungai Penuh dengan Kabupaten Kerinci.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Eka Gunawan pukul 09.00 Wib hari Rabu tanggal 8 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa belum ada tindakan pencegahan yang tegas dari masyarakat Kebijakan pemerintah dalam pencegahan bencana banjir masih kurang.

“Tidak ada spanduk-spanduk yang memperingati masyarakat agar menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke selokan ataupun denda. Dalam hal ini dapat dilihat tidak adanya kebijakan pemerintah untuk berupaya mengurangi bencana banjir secara maksimal.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Maylan pukul 10.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa pencegahan bencana banjir belum adanya kebijakan pemerinah untuk berupaya mengurangi bencana banjir secara maksimal

“Tidak adanya keseriusan pemerintah untuk membangun gorong-gorong atau drainase untuk pencegahan banjir. Drainase yang dibuat kenyataannya hanya sekedar mengganti material lama dengan yang baru dan belum dapat mengatasi bencana banjir yang terjadi jikalau hujan lebat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Dion Minozal pukul 11.15 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa belum maksimalnya pencegahan bencana banjir oleh pemerintah.

“Belum maskimalnya pemerintah melakukan penanggulangan banjir, karena pembangunan yang dilakukan belum dapat mengatasi bencana banjir secara menyeluruh

(Hasil wawancara dengan Bapak Adnan pukul 10.05 Wib hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa belum maksimalnya pencegahan bencana banjir oleh pemerintah, dan belum maksimalnya pembangunan dalam penanganan bencana banjir.

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci oleh Bapak Abbrardani yaitu,

“belum adanya kebijakan yang menindak secara tegas bagi masyarakat yang masih suka membuang sampah di selokan sehingga ketika hujan lebat semua sampah didrainase keluar meluap ketengah jalan sehingga merusak kebersihan jalan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abbrardani pukul 11.45 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari pendapat informan dapat diinterpretasikan bahwa, belum adanya kebijakan yang menindak secara tegas bagi masyarakat yang masih suka membuang sampah di selokan

Dari jawaban informan secara keseluruhan dapat diinterpretasikan bahwa, peranan Stakeholder dalam membuat kebijakan pencegahan bencana banjir belum dilakukan secara serius atau belum maksimal karena daerah yang terdampak banjir sampai sekarang belum ada solusi yag diberikan pemerintah. Bahkan masyarakat dibiarkan sendiri membenahi daerah mereka secara meandiri melalui tetangga yang bersimpati atau warga masyarakat disekitar bencana yang membantu meringankan beban mereka.

Mitigation (peringatan)

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah peranan Stakeholder dalam memberikan peringatan pencegahan bencana banjir? Jawaban dari informan yaitu:

“Peran stakeholders dalam mengingatkan masyarakat khususnya dikawasan rawan bencana banjir masih jarang. Masih kurangnya peringatan secara dini terutama dalam memberitahukan dan mengingatkan masyarakat akan bencana banjir. Baik melalui masjid-masjid ataupun melalui informasi ke desa-desa.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Idoli pukul 10.45 Wib hari Senin tanggal 6 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan masih kurangnya tindakan pemerintah dalam memberikan peringatan kepada masyarakat akan bencana banjir

“peringatan dari pihak pemerintah kepada masyarakat yang rawan terdampak bencana banjir secara serius dapat dikatakan tidak ada, walaupun ada peringatan kepada masyarakat itupun sudah terjadi bencana banjir barulah banyak tokoh masyarakat dan pihak pemerintah yang ikut prihatin tanpa ada peringatan sebelum terjadinya bencana banjir.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Eka Gunawan pukul 09.00 Wib hari Rabu tanggal 8 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa peringatan dari pihak pemerintah kepada masyarakat yang rawan terdampak bencana banjir secara serius dapat dikatakan tidak ada,

“Peringatan dalam rangka mengurangi bencana banjir ada tetapi tidak dilakukan secara global, dalam artian tidak ada peringatan secara kontinyu untuk semua masyarakat. Karena yang namanya bencana tidak selamanya bisa diprediksi.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Maylan pukul 10.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa belum maksimalnya peringatan tu mitigasi secara kontinyu untuk semua masyarakat.

“pemerintah sudah melakukan peringatan khususnya terhadap wilayah-wilayah yang rawan bencana banjir, tapi yang namanya masyarakat sudah tinggal dikawasan yang rawan banjir tidak punya pilihan lain, belum ada pencegahan yang serius dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Dion Minozal pukul 11.15 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa belum ada pencegahan yang serius dari pemerintah khususnya didaerah yang rawan banjir.

“Peringatan pencegahan bencana banjir ada dilakukan oleh pemerintah hanya saja belum ada tindakan yang dilakukan dalam membangun sarana penanggulangan bencana banjir seperti minimnya sarana prasarana bantuan

(Hasil wawancara dengan Bapak Adnan pukul 10.05 Wib hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa secara mitigasi ada dilakukan hanya untuk sekedar mengingatkan masyarakat dan belum pembangunan dalam penanganan bencana banjir, karena sampai saat ini bila hujan lebat maka banjir terus terjadi.

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci oleh Bapak Abbrardani yaitu,

“peringatan bagi masyarakat khususnya yang berada di area rawan banjir, seperti bila mulai musim hujan masyarakat diingatkan untuk waspada dan berhati-hati apabila bencana banjir datang melanda, hanya sebatas itu saja tindakan yang lain belum ada.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abbrardani pukul 11.45 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah ada melakukan peringatan kepada masyarakat khususnya di daerah rawan banjir.

Dari jawaban informan diatas secara keseluruhan tentang peranan Stakeholder dalam memperingatkan masyarakat akan bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam memperingatkan masyarakat akan bahaya bencana banjir khususnya dikawasan yang menjadi rutinitas tergenang banjir jika hujan turun terus menerus dan sepertinya sudah menjadi agenda terjadinya banjir paling tidak 2 kali dalam setahun. Peringatan itu hanya bersifat informasi umum belum ada tindakan yang lebih tegas dengan memberikan peringatan kawasan banjir masyarakat diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak adanya sanksi yang tegas mealui spanduk-spanduk ataupun edaran yang bersifat resmi.

Preparedness (kesiapsiagaan)

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah peranan Stakeholder dalam kesiapsiagaan pencegahan bencana banjir? Jawaban dari informan yaitu:

“Dalam hal kesiapsiagaan bencana banjir pemerintah telah berupaya melalui BPBD Badan Penanggulangan bencana Daerah. Dengan menyediakan alat-alat operasional untuk menanggulangi jika terjadi banjir. Dalam hal ini petugas selalu siap untuk membantu masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Idoli pukul 10.45 Wib hari Senin tanggal 6 Juli 2020)

Dari pendapat diinforman diatas dapat diinterpretasikan bahwa dalam kesiapsiagaan pemerintah telah melakukannya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana banjir petugas selalu siap membantu masyarakat karena itulah tugas mereka, hanya saja banyak masyarakat yang mengatasi dan menanggulangi sendiri bila banjir melanda kawasan mereka, hal ini dimaklumi karena jumlah masyarakat terdampak tidak sebanding dengan petugas, tapi pada prinsipnya petugas BPBD selalu siap membantu masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Eka Gunawan pukul 09.00 Wib hari Rabu tanggal 8 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selalu siapsiaga dalam membantu masyarakat yang kena musibah banjir.

“mengenai kesiapsiagaan bencana banjir, masyarakatlah yang harus siap-siap kalau-kalau ada bencana. Petugas BPBD datang membantu jika masyarakat tidak sanggup lagi mengatasi sendiri.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Maylan pukul 10.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pemerintah siapsiaga membantu melalui BPBD, apabila masyarakat tidak sanggup lagi mengatasi musibah banjir

“kesiapsiagaan dalam bencana banjir antara pemerintah yang berkompeten, petugas dan masyarakat sudah siap hanya dalam prakteknya masyarakat melakukannya dengan upaya mandiri, selagi masyarakat bisa mengatasi sendiri petugas belum akan turun.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Dion Minozal pukul 11.15 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, bencana banjir diatasi sendiri oleh masyarakat yang terdampak banjir bersama-sama melakukan sebelum pihak pemerintah turun untuk membantu.

“Masyarakat melakukan penanggulangan bencana banjir sering dilakukan secara mandiri karena bencana banjir masih dapat diatasi dan secara gotong royong membantu masyarakat yang terdampak banjir

(Hasil wawancara dengan Bapak Adnan pukul 10.05 Wib hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa belum maksimalnya pencegahan bencana banjir oleh pemerintah, dan bantuan masih dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat.

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci oleh Bapak Abbrardani yaitu,

“kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir, petugas BPBD selalu siap membantu masyarakat karena itu memang sudah tugasnya, hanya saja bantuan tersebut datang kalau bencana yang melanda masyarakat tidak bisa ditanggulangi secara mandiri maka BPBD siap membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir.

(Hasil wawancara dengan Bapak Abbrardani pukul 11.45 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selalu siap siaga membantu masyarakat yang kena musibah banjir, jika masyarakat membutuhkan bantuan.

Dari jawaban informan diatas secara keseluruhan tentang peranan Stakeholder dalam kesiapsiagaan dalam bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa, selama ini yang terjadi bahwa masyarakat berupaya sendiri menanggulangi bencana banjir seperti mengatasi agar air tidak masuk rumah ketika hujan lebat dan barang-barang tidak hanyut oleh banjir. Pihak yang berwenang yaitu pemerintah melalui BPBD siap membantu bila sudah ada korban baik korban materil atau ada anggota masyarakat yang hanyut. Selagi masyarakat bisa mengatasi makamasyarakat akan mengatasinya sendiri seperti itulah kenyataan dilapangan yang terjadi selama ini.

Disaster impact (dampak bencana)

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah peranan Stakeholder dalam penanganan dampak bencana banjir? Jawaban dari informan yaitu:

“Pada prinsipnya sebagai pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan dampak bencana banjir sebagai antisipasi ada dilakukan seperti pembuatan tanggul hanya di beberapa tempat

atau perbaikan drainase tidak banyak membantu situasi sebelumnya yang banjir ketika hujan setelah drainase diperbaiki tetap banjir dan meluap kejalan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Idoli pukul 10.45 Wib hari Senin tanggal 6 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, untuk mengatasi bencana banjir pemerintah telah melakukan perbaikan drainase. Tetapi belum begitu banyak membantu mengurangi banjir di daerah-daerah yang rawan terdampak bencana banjir.

“dampak bencana banjir di Kota Sungai Penuh ada juga yang merusak sarana dan prasarana umum memang tidak ada dampaknya hanya berupa meluapnya air kejalan dan sampah-sampah yang bertebaran dijalan setelah banjir surut.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Eka Gunawan pukul 09.00 Wib hari Rabu tanggal 8 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, dampak bencana banjir tidak hanya merusak rumah penduduk tetapi juga merusak sarana dan prasarana umum yang harus mendapatkan penanggulangan dari pemerintah.

“Banjir sering terjadi di Kota Sungai Penuh itu sudah menjadi langganan bagi masyarakat seperti didaerah yang rendah, bahkan sudah menjadi rutinitas 2 kali dalam setahun sebagian rumah-rumah masyarakat tergenang banjir seperti didaerah rawang, tanah kampung dan sekitarnya. Sejauh ini belum ada, hanya sebatas rumah tergenang air, korban lainnya belum ada dan mudah2an tidak ada.

(Hasil wawancara dengan Bapak Maylan pukul 10.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, bencana banjir yang terjadi hanya terdampak pada kawasan yang rendah yang sudah menjadi rutinitas masyarakat.

“Di Kota Sungai Penuh memang sering terendam banjir untuk beberapa daerah bila hujan lebat terus menerus karena daerah Kota Sungai Penuh merupakan daerah curah hujan, selama ini pemerintah selalu siap dan membantu asyarakat yang terdampak banjir dan syukurnya selama ini tidak ada dampak yang besar terhadap masyarakat walaupun demikian pemerintah selalu siap membantu melalui BPBD.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Dion Minozal pukul 11.15 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pemerintah selalu siap dalam menanggulangi bencana banjir khususnya daerah yang berada di kawasan rendah yang menjadi rutinitas pada musim hujan.

“Dampak bencana yang terejadi belum ditanggulangi secara maskimal oleh pemerintah, karena dampak dari bencana banjir, belum dilakukan dengan maksimal belum adanya pembangunan yang dilakukan belum dapat mengatasi bencana banjir.

(Hasil wawancara dengan Bapak Adnan pukul 10.05 Wib hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa belum maksimalnya pencegahan bencana banjir oleh pemerintah, karena dampak bencana banjir yang terjadi tidak semua masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah.

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci oleh Bapak Abbrardani yaitu,
“Banjir sudah merupakan situasi dimana di beberapa daerah di Kota Sungai Penuh memang merupakan pemukiman yang rendah, jadi hujan beberapa hari saja air sudah menggenangi rumah penduduk, sampai saat ini masyarakat masih bisa menanggulangi secara mandiri ataupun dibantu oleh petugas BPBD.
(Hasil wawancara dengan Bapak Abbrardani pukul 11.45 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, bencana banjir selama ini masih bisa diatasi masyarakat dengan dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari jawaban informan diatas secara keseluruhan tentang peranan Stakeholder dalam penanganan dampak bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa belum ada kebijakan dari pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana banjir. Dimana sampai saat ini daerah yang sering mengalami banjir belum teratasi dengan baik. belum ada tindakan yang signifikan yang dapat mengurangi masyarakat dari bahaya banjir.

Response (tanggapan)

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah peranan Stakeholder dalam menanggapi bencana banjir? Jawaban dari informan yaitu:

“tanggapan terhadap bencana banjir sejauh ini pemerintah ataupun BPBD memberikan respon yang positif dan selalu membantu masyarakat yang terdampak musibah bencana banjir seperti memberikan bantuan kebutuhan pokok pangan dan sandang, tetapi alhamdulillah sejauh ini bencana banjir masih dapat diatasi baik secara mandiri oleh masyarakat ataupun atas bantuan pemerintah melalui BPBD.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Idoli pukul 10.45 Wib hari Senin tanggal 6 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, tanggapan terhadap bencana banjir sejauh ini pemerintah ataupun BPBD memberikan respon dan menanggapi persoalan banjir di kota Sungai Penuh

“tanggapan masyarakat baik tokoh masyarakat ataupun pemerintah dan pihak yang berwenang dalam menanggapi bencana banjir ini cukup baik ada saling membantu diantara masyarakat, khususnya di daerah yang terdampak banjir yang sudah menjadi rutinitas paling sedikit 2 kali dalam setahun.”

Hasil wawancara dengan Bapak Eka Gunawan pukul 09.00 Wib hari Rabu tanggal 8 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, tanggapan masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi bencana banjir ini cukup baik.

“kebijakan pemerintah dalam menanggapi bencana banjir sudah baik, dimana pihak yang berwenang sudah berupaya untuk terus mengikatkan baik melalui Desa ataupun RT agar masyarakat hati-hati terhadap bahaya banjir pada saat musim hujan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Maylan pukul 10.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, kebijakan pemerintah dalam menanggapi bencana banjir sudah baik, dimana pihak yang berwenang sudah berupaya untuk terus mengikatkan baik melalui Desa ataupun RT.

“tanggapan pemerintah terhadap bencana banjir di Kota Sungai Penuh yaitu berupaya mendirikan posko-posko bantuan dan tempat tinggal sementara di tenda-tenda sementara, bila banjir sudah surut masyarakat kembali kerumah mereka.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Dion Minozal pukul 11.15 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pemerintah sudah menanggapi bencana banjir yang terjadi selama ini dengan mendirikan posko-posko bantuan dan tenda-tenda untuk tempat tinggal sementara.

“Belum maksimalnya tanggapan dari pemerintah dalam melakukan penanganan banjir.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adnan pukul 10.05 Wib hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa belum maksimalnya tanggapan pemerintah dalam melakukan pencegahan bencana banjir.

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci oleh Bapak Abbrardani yaitu,

“dalam hal kebijakan pemerintah dalam menanggapi bahaya banjir sudah dilaksanakan dengan maksimal, dimana pemerintah terus mengupayakan agar masyarakat dapat terhindar dari bencana banjir melalui BPBD yang selalu siap membantu masyarakat yang kena musibah bencana banjir.

(Hasil wawancara dengan Bapak Abbrardani pukul 11.45 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, kebijakan pemerintah dalam menanggapi bahaya banjir sudah dilaksanakan dengan maksimal.

Dari jawaban informan diatas secara keseluruhan tentang peranan Stakeholder dalam menanggapi bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah sudah memberikan tanggapan yang baik kepada masyarakat dengan berempati memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir, hanya saja belum ada tindakan yang serius dalam mengatasi bencana banjir. Di Kota Sungai Penuh ada kawasan yang menjadi langganan banjir, dimana masyarakat mengalami kerusakan rumah dan air kali yang meluap padahal drainase sudah diperbaiki. Untuk sekedar tanggapan oleh pemerintah tetapi tidakan (action) yang belum ada sampai saat ini seperti membuat tanggul ataupun memperbaiki kali dengan membuat dam yang koko agar masyarakat aman dari banjir.

Recovery (pemulihan)

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah peranan Stakeholder dalam pemulihan bencana banjir? Jawaban dari informan yaitu:

“Peranan stakeholder dalam pemulihan pasca terjadinya bencana yaitu, dengan membantu membersihkan pekarangan ataupun jalan diarea banjir, membenahi got dan kali dari tumpukan sampah yang meluap sampai kejalan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Idoli pukul 10.45 Wib hari Senin tanggal 6 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, Peranan stakeholder dalam pemulihan pasca banjir sudah dilaksanakan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir.

“ pemerintah sudah melakukan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir baik dari segi sembako dan membantu membetulkan bila ada rumah masyarakat yang rusak karena bencana banjir.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Eka Gunawan pukul 09.00 Wib hari Rabu tanggal 8 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pemerintah sudah melakukan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir

“bencana Banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh tidak begitu sering walaupun demikian masih ada rumah-rumah penduduk yang berada dikawasan yang rendah sehingga beresiko dimasuki air jikalau hujan lebat terus menerus, bagi masyarakat yang terdampak banjir yang rumahnya mengalami kerusakan pemerintah selalu siap membantu melakukan pemulihan melalui BPBD.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Maylan pukul 10.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pemerintah selalu siap membantu melakukan pemulihan pada masyarakat yang terdampak banjir melalui BPBD.

”Pemulihan bagi rumah masyarakat yang terdampak bencana banjir sudah dilakukan bantuan perbaikan rumah masyarakat yang rusak apabila masyarakat itu sendiri tidak mampu untuk memperbaikinya maka pemerintah yang membantu sedangkan bagi masyarakat yang sanggup memperbaiki sendiri mereka lakukan secara mandiri.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Dion Minozal pukul 11.15 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, Pemulihan bagi rumah masyarakat yang terdampak bencana banjir sudah dilakukan bantuan perbaikan oleh pemerintah.

“Pemulihan bagi masyarakat yang terdampak banjir juga belum maksimal karena pemerintah belum melakukan pemulihan bagi masyarakat secara maksimal karena tidak semua masyarakat memperoleh bantuan dari pemerintah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adnan pukul 10.05 Wib hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa belum maksimalnya pencegahan bencana banjir oleh pemerintah, dan belum maksimalnya pembangunan dalam penanganan bencana banjir.

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci oleh Bapak Abbrardani yaitu,

“bencana banjir yang merugikan masyarakat baik dalam bentuk kerusakan kecil dan air yang menggenangi rumah penduduk dapat ditanggulangi oleh pemerintah dan masyarakat yang saling membantu mengatasi bencana banjir yang selama ini telah terjadi beberapa tahun belakangan dan alhamdulillah tidak ada korban yang tidak dapat dibantu pemerintah

semuanya selalu diupayakan pemerintah agar masyarakatnya dapat terhindar dan selamat dari bencana banjir.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abbrardani pukul 11.45 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pemerintah sudah menanggulangi pasca bencana banjir dengan melakukan perbaikan rumah yang rusak.

Dari jawaban informan diatas secara keseluruhan tentang peranan Stakeholder dalam pemulihan bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa belum maksimalnya pemerintah melakukan pemulihan bencana banjir. Hal ini dibuktikan setiap tahunnya kawasan yang rendah masih tergenang air bahkan sampai satu meter yang dapat merugikan masyarakat seperti kerusakan perabot rumahtangga dan perbaikan kembali rumah yang rusak karena air tergenang di dalam rumah, pemerintah belum maksimal dalam mengatasi bencana banjir yang terjadi dikawasan yang rawan tergenang oleh banjir.

Development (pembangunan)

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah peranan Stakeholder dalam pembangunan bencana banjir? Jawaban dari informan yaitu:

“Pembangunan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir hanya bersifat membantu memperbaiki kerusakan tetapi untuk membangun sarana dan prasarana perekonomian masyarakat yang terdampak banjir.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Idoli pukul 10.45 Wib hari Senin tanggal 6 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pemerintah sudah membantu pembangunan sarana dan prasarana yang terdampak bencana banjir.

“Upaya untuk membangun rumah masyarakat yang kena musibah banjir ada dilakukan oleh pemerintah melalui BPBD baik memberikan bantuan secara moril maupun materil tergantung berapa parahnya kerusakan yang dialami oleh masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Eka Gunawan pukul 09.00 Wib hari Rabu tanggal 8 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pemerintah sudah melakukan membangun rumah masyarakat yang kena musibah pasca banjir dengan melihat kerusakan yang dialami oleh masyarakat.

“pembangunan untuk daerah yang terkena banjir sudah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki rumah masyarakat yang rusak dan memperbaiki sarana prasarana umum seperti membersihkan jalan raya dari sampah yang bertebaran yang meluap dari got.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Maylan pukul 10.00 Wib hari Selasa tanggal 14 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pembangunan untuk daerah yang terkena banjir sudah dilakukan oleh pemerintah dengan memperbaiki rumah masyarakat dan sarana prasarana yang rusak.

“dalam hal ini pemerintah sudah melakukan pembangunan yang sifatnya membantu masyarakat yang kena musibah bencana banjir, seperti melakukan perbaikan-perbaikan baik rumah masyarakat ataupun asarana umum.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Dion Minozal pukul 11.15 Wib hari Kamis tanggal 16 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pemerintah sudah melakukan pambangunan perbaikan bangunan yang terdampak banjir.

“Pembangunan kembali bagi masyarakat yang terdampak banjir juga belum maksimal karena belum masyarakat mendapatkan bantuan pembangunan yang betul-betul membantu masyarakat secara maksimal karena bantuan hanya berupa kebutuhan pokok, belum adanya bantuan membangun perumahan yang rusak secara maksimal oleh pemerintah.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Adnan pukul 10.05 Wib hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa belum maksimalnya pembangunan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir secara merata dan maksimal kerna banauan hanya berupakan kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian.

Jawaban dari informan biasa diperkuat lagi oleh informan kunci oleh Bapak Abbrardani yaitu,

“sebagai pihak yang berwenang dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir sudah dilakukan perbaikan dan merehap sarana prasarana umum yang rusak baik dilakukan secara bersama dengan pihak desa dan melalui BPBD.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Abbrardani pukul 11.45 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

Dari pendapat informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah melakukan pembangunan bagi bangunan yang rusak karena bencana banjir.

Dari jawaban informan diatas secara keseluruhan tentang peranan Stakeholder dalam membangun kembali daerah yang terdampak bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah sudah melakukan kebijakan membantu membangun masyarakat dengan memperbaiki rumah yang rusak dan sarana prasarana umum yang terdampak yang dapat memngganggu rutinas masyarakat seperti membersihkan jalan yang tergenang air, lumpur dan sampah yang meluap dari kali melalui BPBD.

IV KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator penelitian yang diteliti tentang peranan Stakeholder dalam penanganan bencana banjir di Kota Sungai Penuh 5 (lima) indikator belum terlaksanakan dengan maksimal yaitu :

1. Peranan Stakeholder dalam membuat kebijakan pencegahan bencana banjir belum dilakukan secara serius atau belum maksimal karena daerah yang terdampak banjir sampai sekarang belum ada solusi yang diberikan pemerintah.
2. Peranan Stakeholder dalam memperingankan masyarakat akan bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam memperingatkan masyarakat akan bahaya bencana banjir khususnya dikawasan yang menjadi rutinitas tergenang banjir

- jika hujan turun terus menerus dan sepertinya sudah menjadi agenda terjadinya banjir paling tidak 2 kali dalam setahun.
3. Peranan Stakeholder dalam kesiapsiagaan dalam bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa, selama ini yang terjadi bahwa masyarakat berupaya sendiri menanggulangi bencana banjir seperti mengatasi agar air tidak masuk rumah ketika hujan lebat dan barang- barang tidak hanyut oleh banjir.
 4. Peranan Stakeholder dalam penanganan dampak bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa belum ada kebijakan dari pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana banjir. Dimana sampai saat ini daerah yang sering mengalami banjir belum teratasi dengan baik.
 5. Peranan Stakeholder dalam menanggapi bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah sudah memberikan tanggapan yang baik kepada masyarakat dengan berempati memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir, hanya saja belum ada tindakan yang serius dalam mengatasi bencana banjir seperti membangun tanggul.
 6. Peranan Stakeholder dalam pemulihan bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa belum maksimalnya pemerintah melakukan pemulihan bencana banjir.
 7. Peranan Stakeholder dalam membangun kembali daerah yang terdampak bencana banjir dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah sudah melakukan kebijakan membantu membangun masyarakat dengan memperbaiki rumah yang rusak dan sarana prasarana umum yang terdampak yang dapat memngganggu rutinas masyarakat seperti membersihkan jalan yang tergenang air, lumpur dan sampah yang meluap dari kali melalui BPBD

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik dan kepada LPPM STIA Nusantara sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN).

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Abdurahman. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta Jakarta
Budimanto. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara Jakarta.
Bugin, B 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers : Jakarta.
Danim, Sudarwan. 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia. Bandung
Flippo Edwin. 2004. Manajemen Personalialia. Edisi 6. Erlangga. Jakarta.
G.R. Terry. 2003. Manajemen Sumber daya Manusia. CV. Andi Karya. Jakarta
Harold Koontz and Wehrich, Heinz. 2006. Human Resource Maajemen, McGraw-Hill Irwin
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2006. Edisi kedua. Balai Pustaka. Jakarta
Lexy J. Moleong. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Erlangga. Jakarta
Miles dan Emzir, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: Rajawali
Pers.
Moh Nazir.2005. Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Jakarta
Nurjanah. 2013. Manajemen Bencana. Alfabeta. Jakarta

- Muhamad Azhar. 2015. Relevansi Azas-azas Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. Jakarta
- Siagian.P.Sondang. 2003. Manajemen Sumber daya Manusia. Aksara Baru. Jakarta
- Soekanto. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru. Rajawali Pers. Jakarta
- Soekidjo Notoatmodjo. 2002. Pengembangan Manajemen Sumber daya Manusia.PT Ranika. Jakarta
- Sugiyono. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta : Penerbit Rineka
- Susanto. 2006. Disaster Management di Negeri Rawan Bencana. Aksara Grafika Pratama. Jakarta
- The Liang Gie. 2002. Asas-azas Manajemen. Mandar Jaya. Bandung
- Thoha. Miftah. 2005. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Prenata Media. Jakarta
- T.Hani Handoko. 2003. Manajemen. BPFEE. Yogyakarta
- Warto. Agus T. Sunit & P. Pantyo. 2002. Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Pada Masyarakat di Daerah Rawan Benana Alam Dalam Era Otonomi Daerah. Departemen Sosial RI. Yokyakarta